

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pasca-kemerdekaan, Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki beragam fenomena politik, yang terdiri dari berbagai upaya golongan dan partai politik dalam mencapai tampuk kekuasaan. Bahwasanya elemen-elemen partai politik ini terbentuk dari beberapa kelompok orang, yang memiliki visi politik yang sama, untuk mencapai kepentingan dari unsur partai politik tersebut. Melihat kembali ketidakstabilan pada masa pasca-kemerdekaan Republik Indonesia yang disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial, memberi ruang bagi partai-partai politik untuk saling bersaing dalam mensejahterakan rakyat Republik Indonesia.¹ Hal ini tampak pada Pemilu tahun 1955 dengan kontestan pemilu yang dihadiri oleh 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perseorangan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, dihadiri oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perseorangan.² Kesadaran akan situasi domestik yang tidak stabil, membuat banyak partai mengupayakan perjuangan politik untuk dapat memperjuangkan kestabilan negara melalui agendanya. Pasca-kemerdekaan

¹Muthiah Alagappa. "Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Space Democratic". *California*: Stanford University Press. (2004): 62.

² ANRI. "Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955". *Jakarta*: Arsip Nasional Republik Indonesia. (2019): 30-33.

memberikan persepsi bahwa Indonesia sedang terpuruk dari segala sisi, terutama situasi politik yang memanas.

Pada masa itu juga, Perang Dingin, atau yang secara definitif memiliki makna perang ideologi, merupakan kontestasi ideologi besar, antara negara-negara yang menganut/mendukung paham Liberalisme dan negara-negara yang menganut paham Komunisme. Ada 2 negara besar yang berseteru, satunya memimpin kebijakan untuk menyebarkan paham Liberalisme, yaitu dipimpin dan digagas oleh Amerika Serikat. Sementara itu di blok yang satunya, Uni Soviet menjadi pionir dan pemimpin dalam menyebarkan paham Komunis, juga menaruh usaha dalam merubah orientasi dunia menjadi utopia Komunisme.³ Penyebaran paham Komunisme menjalar hingga ke seluruh benua, termasuk ke Asia. Salah satunya yang berhasil mewujudkannya adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang beraliran Komunis, pimpinan Mao Tse-tung bersama Partai Komunis Tiongkok (PKT), mampu menyingkirkan Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang dalam perang saudara yang sangat berdarah.⁴ Pada akhirnya, PKT merubah nama Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, yang dipimpin oleh Mao Tse-tung dari PKT.

Sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan RRT diawali sejak tahun 1950, yang ketika Mohammad Hatta menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengusulkan untuk dibukanya hubungan diplomatik

³ Andrzej Walicki. "The Communist Utopia and the Fate of the Socialist Experiment in Russia". *Russian Studies in Philosophy*, Vol. 39, No. 4 (2001): 7.

⁴ Robert A. Garson. "The Origins of the Cold War in Asia". *Review of International Studies*, Vol. 12, No. 4(1986), 293.

antara Indonesia dengan RRT, yang mendominasi daratan Tiongkok pada masa tersebut. Indonesia sendiri menganut kebijakan "Satu Tiongkok" untuk berpihak secara diplomatis kepada RRT, yang dimana Tiongkok pada masa itu terbelah oleh kekuatan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Kuomintang (KMT).⁵ Dengan terbukanya jalur diplomasi antara Republik Indonesia dengan Tiongkok Komunis, secara resmi juga RRT yang dikuasai PKT menempatkan Duta Besar RRT yang pertama, Wang Ren Shu, sebagai perwakilan resmi RRT di Indonesia pada Agustus 1950.⁶ Di lain sisi, Partai Nasionalis Tiongkok (sebagai rival dari PKT), juga berupaya untuk melakukan diplomasi melalui diplomasi "Pintu Belakang" dengan Republik Indonesia, sebagai upayanya mencari pengakuan atas legitimasi dari pemerintahan Tiongkok Nasionalis.⁷

Kemudian pada masa Demokrasi Liberal tahun 1953, Republik Indonesia pada masa itu yang dipimpin oleh Kabinet Ali menggantikan Kabinet Wilopo yang mengundurkan diri. Kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo tersebut menorehkan beberapa hasil cemerlang pada kebijakan luar negeri Republik Indonesia kala itu, mulai dari perjanjian perdagangan dengan Peking, hingga nantinya mampu menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika di tahun 1955.⁸ Pada masa ini juga RRT mencoba untuk memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Tiongkok Komunis, melihat Ali

⁵ Lynda Asiana. "Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus *One China Policy*". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 1 (2017): 23.

⁶ Taomo Zhou. "Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa, 1945-1967". *Jakarta: Tim Penerbit Kompas* (2019): 85

⁷ *Ibid.* Hal. 86-87.

⁸ Merle C. Ricklefs. "Sejarah Indonesia Modern 1200-2004". *Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi* (2005): 491.

Sastroamidjojo memiliki orientasi yang lebih ke arah komunisme. Didukung oleh perkembangan PKI dengan “tampang baru” yang tampak ketika partai tersebut melemparkan dukungannya terhadap Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan mampu meraih dukungan massa yang besar dari sub-organisasinya, yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI).⁹ Sebagai lawannya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, yang juga merupakan salah satu partai besar Islam yang mendapatkan suara terbanyak nomor 2 pada Pemilu 1955, sangat menolak kehadiran PKI dalam panggung perpolitikan nasional terkait insiden Madiun pada tahun 1948.

Maka dari itu, dengan melihat hubungan antara Republik Indonesia dan RRT yang berkembang pada masa Kabinet Ali I, pemerintah Republik Indonesia mengirim Arnold Mononutu sebagai duta besar Tiongkok Komunisme yang pertama.¹⁰ Dengan membuka pintu diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok, pemerintah Indonesia mengupayakan implementasi kebijakan luar negerinya yang ‘Bebas dan Aktif’. Sehingga juga pada tanggal 18 April 1955, Indonesia menjadi negara yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, atau KTT-AA. Sebelumnya, keterangan tentang kebijakan luar negeri Republik Indonesia disampaikan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada sidang program kabinet Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1953, yaitu:

“Karena kita yakin bahwa kerjasama yang erat antara negara-negara Asia Afrika akan memperkuat usaha ke arah mencapai perdamaian dunia yang abadi. Maka kita menganggap kerjasama antara negara itu sangat penting. Kerjasama antara negara Asia dan Afrika sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai pengaturan regional. Lagi pula negara-negara ini,

⁹ Ginanjar & Runalan Soedarmo. “Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)”. *Jurnal Artefak*, Vol. 1, No. 2 (2018): 130-131.

¹⁰ Priyo S. Utomo. “Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965”. *Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1 (2017): 68.

umumnya mempunyai pandangan-pandangan yang sama terhadap beberapa aspek di bidang hubungan internasional.”¹¹

Sesuai dengan pidato Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Republik Indonesia mencoba untuk mengedepankan kebijakan yang kooperatif melalui hubungan-hubungan regional untuk mencapai perdamaian dunia. Konferensi ini juga dihadiri Perdana Menteri RRT kala itu, Zhou Enlai, yang memberikan pidato pada tanggal 19 April 1955 mengenai sikap RRT atas konferensi kerjasama Asia dan Afrika, dengan memberikan dukungannya kepada Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dalam mencanangkan kebijakan luar negeri Republik Indonesia.¹² Sebaliknya, dalam mengupayakan timbal balik kehadiran Zhou Enlai pada KTT-AA 1955, Presiden Soekarno mendatangi RRT untuk pertama kalinya pada tahun 1956. Kunjungan Soekarno tersebut menjadi titik awal dimana Republik Indonesia bisa berhubungan dekat dengan RRT, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1956, Ida Anak Agung Gde Agung, sebagai “pencapaian dalam perkembangan Republik Indonesia pada kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri”.¹³ Presiden Soekarno sendiri melihat perkunjungan ini sebagai metaforanya untuk membangun Republik Indonesia sama seperti RRT.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja. “Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini”. *Bandung*: Penerbit Alumni (1983): 88-89.

¹² Wilson Center Digital Archive. “Main Speech by Premier Zhou Enlai, Head of the Delegation of the People’s Republic of China, Distributed at the Plenary Session of the Asian-African Conference”. Translated from China and the Asian-African Conference (Documents). Peking: Foreign Language Press (1955). <http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121623> (Diakses pada 8 Agustus 2021)

¹³ Hong Liu. “Constructing a China Metaphor: Sukarno’s Perception of the PRC and Indonesia’s Political Transformation”. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 28, No. 1. (1997): 28.

Kedekatan Republik Indonesia dengan RRT juga dapat dilihat pada fenomena Ketika Republik Indonesia menyetujui undang-undang mengenai dwikewarganegaraan terhadap warga etnis Tionghoa di Indonesia di tahun 1958, yang diatur pada Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini berawal dari tanggal 22 April 1955, ketika adanya pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan Perdana Menteri Zhou Enlai.¹⁴ Kemudian, Undang-undang tersebut diberlakukan mulai tahun 1960, yang dimana orang dewasa memiliki waktu 2 tahun untuk memilih kewarganegaraan. Pilihan bagi para etnis Tionghoa di Indonesia yang dihadapkan pada pilihan mereka dalam memilih identitas mereka, yaitu untuk menjadi WNI atau menjadi warga negara RRT. Reaksi dari RRT sendiri, menilai ini langkah yang tepat bagi pemerintahan Republik Indonesia untuk memberikan aspek liberatif bagi masyarakat Tionghoa untuk menekankan kebangsaannya. Akan tetapi, hubungan kedua negara ini memburuk ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan atau yang dikenal dengan “Krisis 1959”. Presiden Soekarno menginginkan kekuasaan-kekuasaan asing atas sumber-sumber ekonomi di Indonesia untuk disingkirkan dalam langkahnya menuju “Deklarasi Ekonomi”,

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan”. Pemerintah Republik Indonesia.

tetapi menghasilkan konflik yang memiliki unsur diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.¹⁵

Kebijakan ini dinilai diskriminatif oleh masyarakat etnis Tionghoa, karena adanya unsur bagi orang asing untuk dilarang berdagang di kawasan luar kota. Akibat dari kebijakan ini juga, sekitar 80 ribu aset yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, diambil alih oleh ABRI untuk kepentingan pribadinya, maupun instansinya.¹⁶ Fenomena ini diupayakan juga oleh pemerintah Republik Indonesia dengan memanfaatkan instansi militer untuk mengatasi permasalahan dagang tersebut, yang mengakibatkan adanya kerusuhan rasial antara masyarakat etnis Tionghoa dengan para anggota Angkatan Darat.¹⁷ Kuatnya dominasi militer ini juga didukung oleh penetapan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) atau Darurat Militer yang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal A. H. Nasution, sebagai respons atas meluasnya pemberontakan dan gagalnya Demokrasi Parlementer tahun 1957.¹⁸ Sehingga Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok kala itu, Chen Yi, mengungkapkan kekecewaannya dengan membuat pernyataan kepada duta besar Soekardjo Wiripranoto tentang penggunaan pasukan militer dalam menangani etnis Tionghoa.¹⁹

¹⁵ Kalyani Bandyopadhyaya. "The Indonesian Economy in Transition: From Guided Economy to New Order". *SAGE Journal*, Vol. 33, No. 4 (1977): 442-443.

¹⁶ Taomo Zhou. "Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War". *New York: Cornell University Press* (2019): 118-119

¹⁷ Mary Somers Heidhues. "Violent, Political, and Administrative Repression of the Chinese Minority in Indonesia, 1945-1998". *Wacana*, Vol. 18, No. 1 (2017): 99.

¹⁸ Merle C. Ricklefs. *Op. Cit.* Hal. 506-507

¹⁹ Taomo Zhou. *Op. Cit.* Hal. 121

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan tujuan menetapkan acuan dan pedoman negara kepada Undang-undang Dasar 1945; serta semakin membuat Presiden Soekarno mencengkram kuat kepemimpinan tunggalnya. Beliau menengahi 2 kekuatan besar yang semakin mendominasi panggung perpolitikan Indonesia, yaitu ABRI dan Partai Komunis Indonesia²⁰, yang dimana dinamika politik Republik Indonesia kala itu berlandaskan pada nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. Pergelutan kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin ini, dapat dilihat ketika militer, khususnya Angkatan Darat mulai melakukan manuver politik untuk memperluas pengaruhnya, dan semakin menunjukkan sikap yang anti-PKI. Melihat adanya upaya perluasan politis dari Angkatan Darat, Presiden Soekarno menginisiasikan upaya untuk menengahi kedua kekuatan tersebut melalui Manifesto Politik - Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (MANIPOL-USDEK) yang disebutkan Presiden Soekarno melalui pidatonya di awal tahun 1960, dan menetapkan dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR). Selain itu juga Presiden Soekarno menetapkan dirinya sebagai Penguasa Perang Tertinggi yang memimpin Komando Tertinggi atau KOTI, untuk menahan perluasan pengaruh Angkatan Darat.²¹ Adanya cengkeraman Presiden Soekarno untuk memegang kendali atas kedua kekuatan ini melalui PBR dan KOTI, membuat beliau sebagai

²⁰ Mackie, J.A.C. "Indonesian Politics Under Guided Democracy". *Australian International Affairs*, Vol. 15, No. 3 (2008): 269-270.

²¹ Mulyer M. Setyahadi. "Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)". *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, No. 1 (2018): 350.

pemimpin yang dapat mempengaruhi, juga menyeimbangkan kedua pihak yang saling bertentangan.

Pada sisi kebijakan internasionalnya, periode Demokrasi Terpimpin menunjukkan adanya perkembangan atas hubungan Republik Indonesia dengan RRT, yang dimana kala itu sempat terhambat dengan adanya protes dari RRT terhadap kebijakan yang bersifat diskriminatif pada tahun 1959. Akhir dari krisis tersebut secara formal ditandai pada tahun 1961, ketika Presiden Soekarno mengunjungi RRT untuk yang kedua kalinya pada bulan Juni. Sebelumnya pada bulan April di tahun yang sama, Menteri Luar Negeri RRT, Chen Yi, juga mengunjungi Republik Indonesia, dalam rangka memperkuat hubungan antara RRT-Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri RRT menemukan *common ground* yang bisa menyatukan kebijakan luar negeri RRT dan Republik Indonesia, yaitu menentang kehadiran imperialisme dan kolonialisme di kawasan Asia. Beliau menekankan posisi RRT agar tetap mendukung negara-negara kawasan Asia dan Afrika, khususnya kepada Republik Indonesia, untuk menentang kehadiran imperialisme dan kolonialisme.²² Dalam hal ini, melihat dinamika politik Republik Indonesia dan RRT yang identik, semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara ini. Khususnya ketika RRT dan Republik Indonesia sebelumnya mampu melaksanakan KTT-AA pada tahun 1955 di Bandung, menunjukkan adanya unsur kesamaan pada orientasi kedua negara dalam melihat dinamika internasional.

²² Peking Review. "New Stage in Sino-Indonesian Friendly Relations". *Peking Review* (1961).

Pada masa ini juga PKI semakin kuat untuk bekerjasama dengan Peking, yang ditandai dengan undangan pemimpin PKI, D.N. Aidit, untuk datang ke Peking pada tahun 1963. Beliau mendapatkan kepercayaan penuh dari PKT sebagai anggota kehormatan di Akademi Ilmu Sosial Sentral Partai PKT dan “Teoritikus Marxist-Leninist yang cemerlang”; sehingga juga, upaya PKI untuk bisa mengkolaborasikan ideologi partainya dengan Presiden Soekarno, dianggap sebagai kebijakan yang benar oleh PKT.²³ Sehingga memasuki periode 1964-1965, hubungan bilateral Republik Indonesia-RRT memasuki fase yang sangat intim, dan mendasari sebuah poros yang dinamakan “Poros Jakarta-Peking”. Pemimpin Angkatan Darat pada saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang menggantikan Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kedua Jenderal ini merupakan perwira yang anti-PKI, yang dimana kedua Jenderal tersebut mengkhawatirkan manuver PKI-RRT untuk memperluas kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Maka dari itu, Angkatan Darat juga semakin mengupayakan *balancing* terhadap rivalnya, melalui pembentukan-pembentukan organisasi massa agar menyeimbangi, hingga meredam aktivitas PKI.²⁴ Seperti contohnya, pembentukan SOKSI atau Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia pada tahun 1960 oleh Angkatan Darat, untuk menjadi rival dari SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang berbasis Komunis pada tahun 1946.

²³ Taomo Zhou. *Op. Cit.* Hal. 155.

²⁴ Setyahadi, M. Mananda. *Op. Cit.* Hal. 352-353.

Pada awal periode tahun 1965, D.N. Aidit menawarkan gagasan mengenai pembentukan unsur pertahanan “Angkatan Kelima” kepada Presiden Soekarno. “Angkatan Kelima” merupakan perluasan matra ABRI di luar dari keempat matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi, yang terdiri dari para kaum petani dan buruh. Gagasan ini lalu diterima oleh Presiden Soekarno dalam memperkuat unsur pertahanan Republik Indonesia melawan imperialisme Inggris kala itu (Konfrontasi Malaysia), tetapi Angkatan Darat melihat hal berbeda ketika gagasan tersebut ditolak oleh Kasad Letnan Jenderal Ahmad Yani.²⁵ Berbeda dengan Angkatan Udara yang dipimpin oleh Kasau Laksamana Madya Omar Dani, Angkatan Udara menyetujui adanya gagasan Presiden Soekarno mengenai pembentukan “Angkatan Kelima” ini, karena angkatan tersebut mampu mendukung kekuatan bersenjata Republik Indonesia secara konvensional. Sehingga pada 23 Januari 1965, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Waperdam Soebandrio dalam kunjungannya ke Peking, membahas tentang bantuan militer dari RRT kepada Republik Indonesia.²⁶ Perdana Menteri RRT Zhou Enlai, memberi pemahaman bahwa militer yang terdiri dari buruh dan tani, mampu menjaga wilayah daratan, udara, hingga kelautan. Berbagai masyarakat, salah satunya organisasi pemuda PKI, Pemuda Rakyat, mendukung adanya upaya pemerintah untuk mempersenjatai buruh dan tani.²⁷ Akan tetapi, gagasan mengenai

²⁵ Setyahadi, M. Mananda. *Op. Cit.* Hal. 354.

²⁶ The New York Times. “Article 1”. *The New York Times* (1965). <https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1965/01/24/issue.html> (Diakses pada 10 Agustus 2021).

²⁷ Stephen King. “Jakarta Seeking Closer Peking Tie”. *The New York Times* (1965). <https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1965/01/19/issue.html> (Diakses pada 10 Agustus 2021).

unsur pertahanan “Angkatan Kelima” akhirnya musnah, setelah adanya pembunuhan terhadap pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, atau yang dikenal sebagai Gerakan 30 September.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menganalisis upaya pembentukan “Angkatan Kelima” oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, terdapat 2 permasalahan yang perlu diteliti;

- 1. Bagaimana dinamika Republik Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok pada konteks Perang Dingin?**
- 2. Bagaimana upaya Republik Rakyat Tiongkok dalam mempengaruhi upaya pembentukan “Angkatan Kelima” di Indonesia?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menyertai analisis serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kerjasama antara Partai Komunis Indonesia, Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pada masa Demokrasi Terpimpin. Adanya urgensi Republik Indonesia saat itu yang memiliki konflik eksternal (Konflik Konfrontasi dan Konflik Irian) serta iklim politik dimana PKI berseteru dengan ABRI, menjadi wacana tentang peng gagasan unsur pertahanan ini. Presiden Soekarno pada masa tersebut sedang berada dalam posisi yang diapit oleh kekuatan PKI dan ABRI, sehingga beliau membutuhkan banyak konsolidasi terkait pembentukan unsur pertahanan ini. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis kerjasama Partai

Komunis Indonesia, Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, sebagai pionir blok Komunisme dalam wilayah Asia Tenggara; dan bagaimana RRT mampu mempengaruhi upaya pembentukan “Angkatan Kelima”. Secara keseluruhan, penulis akan meneliti pengaruh RRT pada pembentukan unsur pertahanan, dengan melihat spektrum politik pada masa Demokrasi Terpimpin dan masa Perang Dingin.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mampu memberi manfaat terhadap pemanfaatan kebijakan-kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Hubungan bilateral RRT dan Republik Indonesia yang dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia menjadi langkah politik dari Republik Indonesia untuk beraliansi dengan RRT, dalam membendung pengaruh Imperialisme pada masa tersebut. Diluar ini, penelitian ini juga menggali lebih jauh tentang kinerja hubungan Republik Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan kebijakan luar negeri dengan negara lainnya. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan teori Hubungan Internasional, yaitu teori Realisme. Proses RRT dalam mengadakan kerjasama untuk meningkatkan aliansi kawasan, merupakan proses *balance of power*, atau penyeimbangan kekuatan, dalam melawan blok Barat. Penulis berharap penelitian ini mampu memberi manfaat akademis dan praktikal untuk pemahaman mengenai unsur pertahanan “Angkatan Kelima”.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan menerapkan sistematika penulisan yang menjabarkan setiap bab yang akan memberi visualisasi penelitian ini. Masing-masing sub-bab akan

memberikan penjelasan tentang informasi penelitian, serta akan menjelaskan gambaran besar penelitian ini.

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembentukan unsur pertahanan “Angkatan Kelima”, yang meliputi upaya kedekatan hubungan Republik Indonesia dengan RRT, hingga persaingan kekuatan antara PKI dengan Angkatan Darat. Selanjutnya, penulis juga memaparkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberi informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II - KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini, penulis akan melakukan penelitian pustaka yang bersumber dari buku-buku dan sumber lainnya mengenai hubungan Republik Indonesia dan RRT. Penulis akan menjelaskan tentang konsep dan teori yang akan menjadi landasan untuk meneliti lebih jauh tentang unsur pertahanan “Angkatan Kelima”. Terdapat 3 konsep utama yang meliputi proses hubungan Republik Indonesia dengan RRT dalam pembentukan unsur pertahanan Angkatan Kelima, yaitu; Perang Dingin di Kawasan Asia Tenggara, Hubungan PKI dengan RRT, dan Posisi Republik Indonesia dalam masa Perang Dingin dan Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

BAB III - METODE PENELITIAN

Penulis akan menjelaskan tentang metode penulisan dan pendekatan penelitian yang akan diterapkan. Bab ini juga akan memberikan penalaran tentang data yang telah diperoleh, dan akan diolah melalui teknik dan analisis data kualitatif.

BAB IV - ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penulis akan memaparkan tentang analisis dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah melalui penjelasan deskriptif, teori dan konsep yang berlaku. Penjabaran dari analisis dan pembahasan tersebut juga akan menggunakan metode penelitian yang diterapkan, sehingga dapat meraih hasil maksimal pada jawaban atas rumusan masalah.

BAB V - KESIMPULAN

Bagian kesimpulan ini akan menjelaskan bagaimana inti dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan mendapatkan jawaban konkrit atas rumusan masalah. Kesimpulan akan menjabarkan secara ringkas bagaimana latar belakang hingga analisis yang mendukung penelitian secara komprehensif.

Bab ini secara khusus memberikan pemahaman mengenai pendahuluan dari kebijakan politik dan fenomena yang terjadi dari periode 1955 hingga 1965. Kemudian juga penulis akan menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan penelitian, sehingga penelitian ini dapat dimanfaatkan secara baik. Terakhir, penulis juga menuliskan struktur dari penelitian ini, mulai dari Bab

1 hingga Bab 5. Bab selanjutnya akan membahas mengenai kerangka berpikir penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan, dan juga untuk mengumpulkan kajian literatur untuk dijadikan sumber utama penulis dalam melakukan penelitian ini.

